



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 89 TAHUN 2015

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kearsipan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 39 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip.
8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
9. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
10. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.
11. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
12. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01.
13. Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur.
14. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.
15. Indeksi Kaitan adalah indek yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam Pola Klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.
16. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Keamanan;

- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

BAB IV
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perincian kesatu, perincian kedua, dan perincian ketiga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 89 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Rosi Erniralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 89 Tahun 2015
 TANGGAL : 7 Oktober 2015
 TENTANG : KLASIFIKASI ARSIP
 PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT.

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, juga berlaku bagi Instansi Pemerintah Pusat yang ada di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta instansi lainnya yang berada di Daerah Provinsi.
 Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, diberi kode dengan angka Arab, diperinci secara DESIMAL dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama komponen.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus. Dalam hubungan masalah didahului oleh perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola.
3. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 100, 700,800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian, dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan dan Ketertiban
400	Kesejahteraan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

5. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

01	Perencanaan
02	Penelitian
03	Pendidikan
04	Laporan
05	Panitia
06	Seminar, Lokakarya, Workshop
07	Statistik
08	Peraturan perundang-undangan
09

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintah Daerah Provinsi, diatur sebagai berikut:

Sekretaris Daerah	Setda
Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM	Ass Pemhukham
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ass Ekbang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	Ass Kesra
Asisten Administrasi	Ass Adm
Biro Pemerintahan Umum	Pemum
Biro Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama	Otdaksm
Biro Hukum dan HAM	Hukham
Biro Perekonomian	Rek
Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah	BUMD
Biro Administrasi Pembangunan	Admbang
Biro Pelayanan Sosial Dasar	Yansos
Biro Pengembangan Sosial	Bangsos
Biro Organisasi	Org
Biro Keuangan	Keu
Biro Pengelolaan Barang Daerah	Pbd
Biro Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Umum	Humasprotum
Sekretariat DPRD	Setwan
Dinas Pendidikan	Disdik
Dinas Kesehatan	Diskes

Dinas Pendapatan	Dispenda
Dinas Sosial	Dissos
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans
Dinas Perhubungan	Dishub
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Disparbud
Dinas Bina Marga	Dis BM
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Dis PSDA
Dinas Permukiman dan Perumahan	Diskimrum
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dis ESDM
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Diskop UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Distan TP
Dinas Peternakan	Disnak
Dinas Perikanan dan Kelautan	Diskanlaut
Dinas Kehutanan	Dishut
Dinas Perkebunan	Disbun
Dinas Olah Raga dan Pemuda	Disorda
Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
Inspektorat	Inspt
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPP
Badan Kepegawaian Daerah	BKD
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badiklatda
Badan Ketahanan Pangan Daerah	BKP
Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu	BPMPT
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	BPLHD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I	BKPPW-I
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II	BKPPW-II
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III	BKPPW-III
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV	BKPPW-IV
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Bapusipda
Badan Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana	BP3APKKB

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	BPMPD
Kantor Perwakilan	Kpwk
Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	BP3IPTEK
Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
Rumah Sakit Jiwa	RSJ
Rumah Sakit Paru	RSP
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	RS Ihsan
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Set KPID
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
Sekretariat DP KORPRI	Set KORPRI
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Set BAKORLUH

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147,231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147,23 dan 147.23 merupakan bagian dari 147, 147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100.

Contoh :

100	Pemerintah	(Perincian pertama)
140	Desa/Kelurahan	(Perincian Kedua)
147	Pembangunan Desa	(Perincian Ketiga)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:
 - a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. 188.34 Peraturan Daerah
 - c. 188.3 Peraturan
 - d. 188 Peraturan Perundang-undangan

untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil, misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.

Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

591	Tata GunaTanah
.02	Perpetaan
147	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
.13	Latihan Kerja Masyarakat
.135	Kurikulum/Silabus

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain.

Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

7. Apabila pada kode ada petunjuk “tambahan perincian” berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain

Contoh I : Proyek Pasar

050 - Perencanaan (Proyek)

511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)

55.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

050 - Perencanaan

630 - Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 - Proyek Jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai. Titik desimal dihilangkan.

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar.

- a. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun.

Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).

- b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasi 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian APPKD(142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian isi sama-sama benar.

Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang.

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh : Surat tentang “ Pesawahan untuk transmigrasi” dapat diberi kode 521.5 (Pesawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

10. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

1. Perincian pertama:

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan/Ketertiban
400	Kesejahteraan Rakyat
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

2. Perincian kedua:

000	UMUM
010	Urusan Dalam
020	Peralatan
030	Kekayaan Daerah
040	Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi
050	Perencanaan
060	Organisasi/ Ketatalaksanaan
070	Penelitian
080	Konferensi
090	Perjalanan Dinas
100	PEMERINTAHAN
110	Pemerintahan Pusat
120	Pemerintahan Provinsi
130	Pemerintahan Kabupaten/ Kota
140	Pemerintahan Desa/ Kelurahan
150	DPR/ MPR
160	DPRD Provinsi

170	DPRD Kabupaten/ Kota
180	Hukum
190	Hubungan Luar Negeri
200	POLITIK
210	Kepartaian
220	Organisasi Kemasyarakatan
230	Organisasi Profesi dan Fungsional
240	Organisasi Pemuda
250	Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
260	Organisasi Wanita
270	Pemilihan Umum
280	Komisi Pemilihan Umum
290	Badan Pengawas Pemilu
300	KEAMANAN/ KETERTIBAN
310	Pertahanan
320	Kemiliteran
330	Keamanan
340	Pertahanan Sipil
350	Kejahatan
360	Bencana
370	Kecelakaan
380	-
390	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
410	Jaring Pengaman Sosial
420	Pendidikan
430	Kebudayaan
440	Kesehatan
450	Agama
460	Sosial
470	Kependudukan
480	Media Massa
490	-
500	PEREKONOMIAN
510	Perdagangan
520	Pertanian

530	Perindustrian
540	Pertambangan Kesamuderaan
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja
570	Permodalan
580	Perbankan/Moneter
590	Agraria
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan
690	Air Minum
700	PENGAWASAN
710	Bidang Pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan/Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	-
780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang Keuangan
800	KEPEGAWAIAN
810	Pengadaan
820	Pengangkatan dan Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan
850	Cuti
860	Penilaian
870	Tata Usaha
880	Pemberhentian
890	Pendidikan

900	KEUANGAN
910	Anggaran
920	Otoritasi
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	-
990	Bendaharawan

KLASIFIKASI ARSIP**Perincian Ketiga****000 UMUM**

000	UMUM
001	Lambang
.1	Garuda
.2	Bendera Kebangsaan
.3	Lagu Kebangsaan
.4	Daerah
.41	Provinsi
.42	Kabupaten/Kota
.5	LPND
.6	Lambang Lainnya
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan (Untuk Pegawai Lihat Hal. 861.10)
.1	Bintang
.2	Setyalencana
.3	Parasamya Purna Karya Nugraha
.4	Monumen
.5	Penghargaan Secara Adat
.6	Penghargaan lainnya
003	Hari Raya/Besar
.1	Nasional 17 Agustus, Hari pahlawan dan sebagainya
.2	Hari Raya Keagamaan
.3	Hari Ulang Tahun
.4	Hari-hari besar Internasional, Hari-hari besar lainnya
004	Ucapan
.1	Ucapan Terima Kasih
.2	Ucapan Selamat
.3	Ucapan Belasungkawa
.4	Ucapan-ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
.1	Pamong Praja
.2	Tanda pengenalan
.3	Pejabat lainnya
007	-
008	-

- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
 - Gedung Kantor / Termasuk Instalasi Prasarana Fisik
- 011 Kantor/Dinas
 - .1 Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan I
 - .4 Rumah Dinas Golongan II
 - .5 Rumah Dinas Golongan III
 - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
 - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/ *Guest House*/Panti/Wisma/Rumah Susun/Apartemen
- 014 Jasa Air
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Jasa Telepon/Faximile/Internet
- 017 Jasa Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Jasa Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden
 - .22 Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur
 - .23 Pemasangan gambar Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota
 - .3 Audiensi menghadap pimpinan
 - .4 Alamat-alamat kantor dan pejabat
 - .5 Bandir/ Umbul-Umbul, Spanduk
 - .6 Launching
- 020 PERALATAN KANTOR
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis Kantor
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan/Kendaraan Dinas
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata/Alat Pengaman Kantor

- 027 Pengadaan Barang/Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Pemilihan Langsung
 - .3 Seleksi
 - .4 Lelang
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 034 Pengamanan Kekayaan Daerah
- 035 Penghapusan Asset
- 036 Kekayaan lainnya
- 037 Bangunan
- 038 -
- 039 -
- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan
- 042 Dokumentasi
- 043 Jaringan Informasi
 - .1 LAN
 - .2 WAN
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan
 - .33 Penyerahan
 - .34 Pemusnahan

- .4 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - .41 Arsip Aktif
 - .42 Arsip Inaktif
 - .43 Arsip Vital
- .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi
 - .52 Pengolahan
 - .53 Preservasi
 - .54 Akses Arsip Statis
- .6 Pembinaan
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data Elektronik
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
- 051 Bidang Pemerintahan
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan/Ketertiban
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian
- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN
- 061 Organisasi Perangkat Daerah / Instansi Pemerintah
 - .1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor
- 062 Organisasi / Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi/Badan Internasional
- 064 Organisasi / Badan Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
 - .1 Tata Naskah Dinas
 - .2 Stempel
 - .21 Stempel Jabatan
 - .22 Stempel Dinas
 - .3 Papan Nama Instansi Pemerintah/Non Pemerintah
 - .4 Organisasi yang diubah, digabung dan dihapus/Likuidasi
- 066 Tata Hubungan Kerja
 - .1 Telaah Tata Hubungan

- .2 Penyusunan
- .3 Bimbingan
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan
 - .2 Hasil Analisis Jabatan
 - .3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 075 Kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi lain
- 076 Kerja sama penelitian dengan Kementerian Lainnya
- 077 Kerja sama penelitian dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- 078 Rekomendasi Penelitian
- 079 Pemaparan / Ekspose
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lain
- 085 Internasional di dalam negeri
- 086 Internasional di luar negeri
- 087
- 088
- 089
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden di Dalam Negeri
- 092 Perjalanan Menteri di Dalam Negeri
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Pejabat Daerah Ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Negara dan Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 100 PEMERINTAHAN
Meliputi : Tata praja, legislatif, yudikatif, hubungan luar
- 101 Bentuk Pemerintahan
- 102 Sistem Pemerintahan
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 111 Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- .1 Pertanggungjawaban Presiden
- .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- 113 Susunan Kabinet
- .1 *Reshuffle*
- .2 Penunjukan Menteri Ad.interim
- .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Departemen Lainnya
Meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- .1 Amanat Menteri Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
Meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 117 Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 118 Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama antar Departemen

- 120 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
- .04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah
 - .042 Monografi, tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Provinsi
 - .21 Organisasi Perangkat Daerah
 - .22 Instansi Vertikal
 - .3 Kerja sama antar Provinsi
- 121 Gubernur, tambahkan kode wilayah
- Meliputi ; pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,dsb
- .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat Gubernur
- 122 Wakil Gubernur, tambahkan kode wilayah
- Meliputi ; pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,dsb
- 123 Sekretaris Daerah Provinsi, tambahkan kode wilayah
- Meliputi : Pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Pembentukan/pemekaran wilayah
- .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Perubahan Batas Wilayah
 - .3 Pemekaran Wilayah
 - .4 Penambahan Ibukota Provinsi, Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dan sebagainya
- 125 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 Pemerintah Provinsi
 - .2 Panitia Anggaran Provinsi
 - .3 Seminar, Lokakarya dan lainnya
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Otonomi Daerah
- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 Tugas Pembantuan
- 130 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- .04 Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - .21 Dinas Otonom
 - .22 Instansi Vertikal
 - .3 Kerjasama antar Kabupaten/Kota

- 131 Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/walikota
 - .2 Sambutan/pengarahan/amanat/Bupati/Walikota
- 132 Wakil Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 MUSPIDA
 - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
 - .4 Kerja sama antara kabupaten/kota
- 135 Pembentukan/pemekaran Wilayah
- .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Perubahan Batas Wilayah
 - .3 Pemekaran Wilayah
 - .4 Permasalah Batas Wilayah
 - .5 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
 - .6 Pemberian dan Penggantian
 - .7 Pemetaan Wilayah
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan / Otonomi Daerah / Otonomi Khusus
- 138 Pemerintahan Kecamatan
- .1 Sambutan/pengarahan/Amanat Camat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Kecamatan
 - .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 141 Pemerintahan Desa
- .1 Kepala Desa
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.

- .2 Badan Perwakilan Desa
 - Meliputi ; Pembentukan, Keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan BPD.
- .3 Perangkat Desa
 - .31 Sekretaris Desa
 - Meliputi ; pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara.
 - .32 Kepala Dusun
 - Meliputi ; pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara.
 - .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa)
 - .1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Praja)
 - .2 Pembangunan
 - .3 Anggaran Belanja Tambahan
 - .4 Pendapatan Desa
 - .41 Urusan Desa
 - .42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - .43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
 - .44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - .45 Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa
 - .46 Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa
 - .47 Pendapatan asli Desa
 - .48 Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah Hak Pakai Desa
 - .11 Tanah Bengkok
 - .12 Tanah Titisara
 - .13 Tanah Pengangonan
 - .14 Tanah Desa Lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa Lainnya
- 144 Lembaga-lembaga Desa
 - .1 LMD/BPD
 - .2 LKMD/LPM

- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan batas wilayah/perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan nama Desa/Kelurahan
 - .5 Permasalah batas Desa
 - .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
 - .7 Penghapusan Desa/Kelurahan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
 - .1 Pembinaan usaha gotong royong
 - .11 Swadaya gotong royong
 - .111 Penataan gotong royong
 - .112 Gotong royong dinamis
 - .113 Gotong royong statis
 - .114 Pungutan
 - .12 Lembaga Sosial Desa (LDS)
 - .121 Pembinaan
 - .122 Klasifikasi
 - .123 Proyek
 - .124 Musyawarah
 - .13 Latihan Kerja Masyarakat
 - .131 Kader Masyarakat
 - .132 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .133 Pusat Latihan
 - .134 Kursus-kursus
 - .135 Kurikulum/Silabus
 - .136 Keterampilan
 - .137 Pramuka
 - .14 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 - .141 Program
 - .142 Pembinaan Organisasi
 - .143 Kegiatan
 - .15 Penyuluhan
 - .151 Publikasi
 - .152 Peragaan
 - .153 Sosio Drama
 - .154 Siaran Pedesaan
 - .155 Penyuluhan Lapangan
 - .16 Kelembagaan

.161	Kelompok Tani
.162	Rukun Tani
.163	Subak
.164	Dharma Tirta
.165	Mitra Cai
.2	Perekonomian Desa
.21	Produksi Desa
.211	Pengolahan
.212	Pemasaran
.222	Inventarisasi Desa
.223	Perkembangan/pelaksanaan
.224	Bantuan/Simulasi
.225	Petunjuk/Pembinaan pelaksanaan
.23	Koperasi Desa
.231	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.232	Koperasi Unit Desa (KUD)
.24	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.241	Jumlah Desa yang diberi bantuan
.242	Pengarahan
.243	Pusat
.244	Daerah
.25	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.251	Pusat
.252	Daerah
.26	Pelaksana bantuan Pembangunan Desa
.261	Bantuan Langsung
.262	Bantuan Keresasian
.263	Bantuan Juara Lomba Desa
.3	Prasarana Desa
.31	Pembinaan
.331	Lokasi
.332	Diskusi
.333	Pelaksanaan
.34	Masyarakat Pra Desa
.341	Pembinaan
.342	Penyuluhan
.35	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
.351	Rumah Sehat
.352	Proyek Perintis
.353	Pelaksana

- .354 Pengembangan
- .355 Perbaikan Kampung
- .4 Pengembangan Desa
 - .41 Tingkat Perkembangan Desa
 - .411 Jumlah Desa
 - .4112 Pemekaran Desa
 - .4113 Pembentukan Desa Baru
 - .4114 Evaluasi
 - .4115 Bagan
 - .42 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .421 Penyusunan Program
 - .422 Lokasi UDKP
 - .423 Pelaksanaan
 - .424 Bimbingan/Pembinaan
 - .425 Evaluasi
 - .43 Tata Desa
 - .431 Inventarisasi
 - .432 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .433 Aplikasi Tata Desa
 - .434 Evaluasi
 - .44 Perlombaan Desa
 - .441 Pedoman Perlombaan Desa
 - .442 Penilaian
 - .443 Kejujuran
 - .444 Piagam
- .5 Koordinasi
 - .51 Sektor Khusus (K)
 - .52 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .53 Team Koordinasi Pusat
 - .54 Kerja Sama
 - .541 Luar Negeri
 - .542 Perguruan Tinggi
 - .543 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.
 - .2 Sekretaris Kelurahan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.
 - .3 Kepala Lingkungan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.

- .4 Administrasi Kelurahan
- .5 Lembaga-lembaga Tingkat Kelurahan
- 148 Lembaga Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
- 150 MPR/DPR/DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 *Recall*
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 152 Persidangan MPR
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak/Saran/Pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR/DPD
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 156 Persidangan DPR/DPD
 - .1 Sidang Pleno
 - .2 Dengar Pendapat
 - .3 Rapat Komisi
 - .4 Reses
 - .5 Rapat Fraksi
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak DPR
 - .1 Amandemen
 - .2 Angket

- .3 Budget
- .4 Interplasi
- 160 DPRD PROVINSI
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 *Recall*
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat / Hearing / Dialog
 - .4 Rapat-rapat meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran dan sebagainya.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
 - .7 Kunjungan Kerja
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .11 Gaji/Honor
 - .12 Tunjangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak DPRD
 - .1 Budget
 - .2 Interplasi
 - .3 Amandemen
 - .4 Angket
 - .5 Lainnya
- 165 Sekretaris DPRD
- 166 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran
 - .2 Badan Kehormatan
 - .3 Fraksi
 - .4 Komisi
 - .5 Lainnya
- 167 Tenaga Ahli DPRD
- 168 -
- 169 -

- 170 DPRD KABUPATEN/KOTA
- 171 Keanggotaan
- .1 Pencilonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 *Recall*
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat
 - .4 Rapar-rapat meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi, Panitia Anggaran dan Sebagainya.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
- 173 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak/Saran/Pendapat
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM
- .1 Konstitusi
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 Amandemen
 - .3 Amnesti/Abolisi/Grasi
- 181 Perdata
- .1 Perdata
 - .2 Rumah
 - .3 Utang/Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notaris
- 182 Pidana
- .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- 183 Peradilan
 - .1 Jenis-jenis Peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
 - .112 Pengadilan Tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .114 Mahkamah Konstitusi
 - .12 Peradilan Agama Islam
 - .121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
 - .122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - .123 Mahkamah Agung Agama Islam
 - .13 Peradilan Militer
 - .131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
 - .132 Mahkamah Militer Tinggi
 - .133 Mahkamah Militer Agung
 - .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
 - .15 Peradilan Koneksitas
 - .2 Upaya-Upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kasasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
 - .3 Eksekusi
 - .31 Penyitaan Lahan/Bangunan
 - .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
 - .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 *Visa*
 - .2 *Paspor*
 - .3 *Exit/Permit*
 - .4 *Reentry*
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
- 186 Kependudukan/Lembaga Pemasyarakatan

- 187 Kejaksaan
 - .1 *Saksi*
 - .2 *Terdakwa*
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-Undang
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Provinsi
 - .342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - .4 Keputusan
 - .41 Presiden
 - .42 Menteri
 - .43 Lembaga Non Departemen
 - .44 Gubernur
 - .45 Bupati/Walikota
 - .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Non Departemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati/Walikota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
 - .1 Bilateral
 - .2 Multilateral
 - .3 Regional (ASEAN)
 - .4 Internasional
- 194 Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsulat
 - .3 Kuasa Usaha
 - .4 Atase

195	PBB
.1	UNESCO
.2	UNICEF
.3	FAO
.4	UNHCR
.5	WHO
.6	Organisasi lainnya
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri (PHLN)/ <i>LOAN</i>
198	-
199	-

200 POLITIK

- 200 POLITIK
- 201 Kebijakan Umum
- 202 Orde Lama (1945-1965)
- 203 Orde Baru (1966-200)
- 204 Orde Reformasi (2001-2004)
- 205 Orde Persatuan (2004)
- 206 Politik Dalam Negeri
- 207 Kewaspadaan Nasional
- 208 -
- 209 -
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu Tanda Anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Program Partai
- 215 AD / ART
- 216 Pengurus Partai
 - .1 Pimpinan Pusat
 - .2 Pimpinan Wilayah
 - .3 Pimpinan Cabang
 - .4 Pimpinan Anak Cabang
 - .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai
- 219 Pembinaan Parpol
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Ormas Berdasarkan Perjuangan
 - .1 Perintis Kemerdekaan
 - .2 Angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Ormas Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wreda Tama
- 223 Ormas Berdasarkan Kerohanian
 - .1 Nahdatul Ulama

- .2 Muhammadiyah
- .3 Persis
- .4 PGI
- .5 dan lain-lainnya
- 224 Lembaga Adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 Ormas Berdasarkan Kedaerahan
 - .1 Paguyuban Pasundan
 - .2 dan lain-lainnya
- 227 Pembinaan dan Bantuan Keuangan Ormas
- 228 -
- 229 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia
 - .2 Ikatan Bidan Indonesia
 - .3 Organisasi Kesehatan lainnya
- 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan Guru Republik Indonesia
 - .2 Organisasi Guru Swasta / Organisasi Guru lainnya
- 233 Organisasi sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Muda Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia
- 234 Organisasi Advokat/Pengacara
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan Indonesia
 - .1 Persatuan wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
 - .3 Organisasi Wartawan lainnya
- 238 Organisasi Profesi Fungsional
 - .1 Asosiasi Arsiparis Indonesia
 - .2 Ikatan Pustakawan Indonesia
- 239 Organisasi profesi dan fungsional lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar

244	Organisasi Pemuda Keagamaan
245	Organisasi Pemuda Kepartaian
246	Organisasi Pemuda lainnya
247	-
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
251	Organisasi Pekerja/Buruh
.1	Nasional
.2	Internasional
252	Organisasi Petani
253	Organisasi Nelayan
254	Organisasi Angkutan Darat
255	Organisasi Angkutan Laut
256	Organisasi Angkutan Udara
257	-
258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita Persatuan
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
264	Persit Kartika Candra
265	Via Ardia Gharini
266	Jala Senasti
267	Bhayangkari
268	Organisasi Wanita lainnya
269	PKK
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
1.	TPS
2.	Kendaraan
3.	Surat Suara
4.	Kotak Suara
5.	Dana

277	Pemungutan/Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih
280	KOMISI PEMILIHAN UMUM
281	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
282	Komisi Pemilihan Umum Provinsi
283	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
284	Panitia Pemilihan Kecamatan
285	Panitia Pemungutan Suara
286	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
287	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
288	Sengketa Pemilu
289	-
290	BADAN PENGAWAS PEMILU
291	Badan Pengawas Pemilu Indonesia
292	Badan Pengawas Pemilu Provinsi
293	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
294	Badan Pengawas Pemilu Kecamatan
295	Pengawas Pemilu Lapangan
296	Pengawas Pemilu Luar Negeri
297	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
298	Dewan Kehormatan Provinsi
299	-

300 KEAMANAN/KETERTIBAN

- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - .1 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - .2 Penyelidikan dan Penyidikan
- 304 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - .1 Operasi dan Pengendalian
 - .2 Kerja sama
- 305 Sumber Daya Aparatur Keamanan dan Ketertiban
 - .1 Pelatihan Dasar
 - .2 Pelatihan Teknis
- 306 Perlindungan Masyarakat
 - .1 Satuan Perlindungan Masyarakat
 - .2 Bina Potensi Masyarakat
- 307 -
- 308 -
- 309 -
- 310 PERTAHANAN
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Intelejen
- 315 Sistem Pertahanan
- 316 -
- 317 -
- 318 -
- 319 -
- 320 KEMILITERAN
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekayaan TNI, Pejabat Sipil dari TNI
- 325 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
- 326 Alutsista

- 327 Bela Negara
- 328 Sarana dan Prasarana Militer
- 329 -
- 330 KEAMANAN
- 331 Kepolisian
 - .1 Polri
 - .2 Polisi Pamong Praja
 - .3 Polisi Hutan
 - .4 Polisi Khusus
 - .5 Polisi Wisata
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata api/tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/Larangan tentang Keamanan dan Ketertiban
- 339 Terosisme
- 340 PERTAHANAN SIPIL
 - .1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
 - .11 Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota Hansip
 - .12 Pengerahan dan Pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
 - .14 Pembinaan Anggota Hansip/ Linmas
 - .15 Penghargaan Anggota Hansip
 - .16 Hansip/ Linmas Lanjut Usia
 - .17 Data Matrik Hansip dan Menwa
 - .18 Pendidikan/ Latihan Hansip dan Menwa
 - .19 Latihan Keterampilan Pamswakarsa
 - .2 Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh MAsyarakat
 - .21 Orientasi Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh
 - .22 Pemberian tali asih bagi anggota
- 341 Perlindungan sipil
- 342 Latihan Dasar
- 343 Suskalak A
- 344 Suskalak B
- 345 Suspim
- 346 Suskapim
- 347 -

348	-
349	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian
.1	Bunuh Diri
.2	Keracunan
354	Subversi/penyelundupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Pelecehan Seksual
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	BENCANA
361	Gunung Berapi
362	Gempa
363	Angin Topan
364	Tanah Longsor
365	Kekeringan
366	Banjir
367	Kebakaran
368	Tsunami
369	Rob (Banjir Air Laut)
370	KECELAKAAN
371	Kecelakaan Darat
372	Kecelakaan Laut
373	Kecelakaan Udara
374	Sungai/Danau
375	Kecelakaan Lainnya
376	-
377	-
378	-
379	-
380	PENANGGULANGAN BENCANA
381	-
382	-

384	-
385	-
386	-
387	-
388	-
389	-
390	SEARCH AND RESEARCH (SAR)
391	-
392	-
393	-
394	-
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
401	Keluarga Pra Sejahtera	
402	PNPM Mandiri Pedesaan	
402	Jaminan Kesehatan Masyarakat	
403	Subsidi	
404	Program Raskin	
405	Bantuan Langsung Tunai	
406	Jaminan Sosial	
407	Corporate Social Responsibility	
408	-	
409	-	
410	PEMBANGUNAN DESA	
411	Pembinaan usaha gotong royong	
.1	Swadaya gotong royong	
.11	Penataan gotong royong	
.12	Gotong royomh dinamis	
.13	gotong royong statis	
.14	pungutan	
.2	Lembaga soosial desa	
.21	Pembinaan	
.22	Klasifikasi	
.23	Proyek	
.24	Musyawaharah	
.3	Latihan kerja masyarakat	
.31	Kader masyarakat	
.32	Kuliah kerja nyata (KKN)	
.33	Pusat latihan	
.34	Kursus-kursus	
.35	Kurikulum/sylabus	
.36	Keterampilan	
.37	Pramuka	
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pkk)	
.41	Program	
.42	Pembinaan organisasi	
.43	Kegiatan	
.5	Penyuluhan	
.51	Publikasi	

- .22 Diskusi
- .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
- .31 Pembinaan
- .32 Penyuluhan
- .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
- .41 Rumah Sehat
- .42 Proyek Perintis
- .43 Pelaksanaan
- .44 Pengembangan
- .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Pengembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)

.4	Kerjasama
.41	Luar Negeri (UNICEF)
.42	Perguruan Tinggi
.43	Kementrian /Lembaga Non Kementrian
416	-
417	-
418	-
419	-
420	PENDIDIKAN
.1	pendidikan khusus klasifikasi disini pendidikan
421	Sekolah
.1	Pra sekolah Pendidikan Usia Dini
.2	Sekolah Dasar (SD)
.3	Sekolah Menengah
.4	Sekolah Tinggi
.5	Sekolah Kejuruan
.6	Kegiatan sekolah
.7	Kegiatan Pelajar dan Mahasiswa
.71	Reuni, Dharmawisata
.72	Pelajar/Mahasiswa Teladan
.73	Resimen Mahasiswa
.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
.81	Resimen Mahasiswa
.9	Sekolah Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
.1	Persyaratan Masuk Sekolah, testing, pendaftaran,Ospek
.2	Tahun Ajaran
.3	Hari libur
.4	Uang Sekolah/SPP
.5	Beasiswa
.6	Kurikulum
423	Metoda Belajar
.1	Kuliah
.2	Ceramah, Simposium/Seminar
.3	Diskusi
.4	Kuliah Lapangan, Kuliah Kerja Nyata
.5	Kurikulum
.6	Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Desertasi
.7	Ujian

- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Pelatih
- 425 Sarana Pendidikan
- .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .14 Perpustakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku Pelajaran
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
- Klasifikasi disini : PON, Porsade, Olimpiade dan sebagainya
- .1 Cabang Olah Raga termasuk Atlet
 - .2 Sarana Olah Raga
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah Raga
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan
- Meliputi ; Organisasi, sarana dan kegiatan remaja
- Klasifikasi disini : Gelanggang Remaja/Gelanggang Generasi Muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
- .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana Kesenian
 - .3 Prasarana
 - .31 Gedung Kesenian
 - .32 Padepokan
 - .4 Usaha Pertunjukan
- 432 Kepurbakalaan
- .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi, Peninggalan Kuno termasuk pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah dan Nilai Tradisional

- 434 Bahasa
- .1 Bahasa Indonesia
 - .2 Bahasa Daerah
 - .3 Bahasa Asing
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- .1 Upacara Adat
 - .2 Pakaian Adat
 - .3 Rumah Adat
- 436 Kepercayaan
- 437 Adat Tradisional, Pelestarian dan Revitalisasi Kebudayaan
- 438 Perlindungan Kebudayaan
- 439 Kearifan Lokal Kesenian
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
- .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Penyakit Dalam, Kanker
 - .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 PIN (Pekan Imunisasi Nasional)
- 442 Obat-Obatan
- .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular, Pemberantasan Penyakit
- .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC
 - .25 HIV, AIDS
 - .3 Epidemiology dan Karantina (Epidika)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Survailense
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria

- .42 Dengue (Demam berdarah)
- .43 Filaria
- .44 Serangga
- .45 Rabies
- .46 Antraks
- .47 Flu Burung
- .5 Sanitasi
 - .41 Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman.
 - .42 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .43 Pestisida
 - .44 Pencemaran Lingkungan
- .6 Hygiene
 - .61 A. Pektoris
 - .62 IMA
 - .63 Hipertensi
 - .64 Stroke
 - .65 Diabetes Melitus (DM)
 - .66 CA. Service
 - .67 CA. Mammae
 - .68 CA. Hepak
 - .69 CA. Paru
- .7 Dekopensatiokordis
 - .71 PPOM
 - .72 Asma
 - .73 Kecelakaan Lalu Lintas
 - .74 Psikosis
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan, Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahan Amal Sekolah (PMTAS)
- 445 Rumah Sakit / Poliklinik
 - .1 RSUP
 - .2 Rumah Sakit Jiwa
 - .3 Rumah Sakit Mata
 - .4 Puskesmas
 - .5 Balai Kesehatan (Poliklinik)
 - .6 Balai Kesehatan Ibu dan Anak
 - .7 Rumah Sakit Bersalin

- .8 Posyandu
- .9 Rumah Sakit Paru
- 446 Tenaga Medis/Paramedis
- 447 Alat Medis
 - .1 Pengadaan Alat Kesehatan
 - .2 Penyimpanan Alat Kesehatan
 - .3 Standarisasi Alat Kesehatan
 - .4 Penghapusan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun
- 449 Apotik/Toko Obat
 - .1 Surat Izin
 - .2 Surat Izin Kerja
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .15 Haji
 - .16 Umroh
 - .2 Rumah Ibadah / Masjid/Mushola
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan Agama Islam
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku Agama
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama (Wakaf, Baitul Maal dsb)
 - .6 Peradilan Agama

- .7 Organisasi Keagamaan bukan Politik Majelis Ulama
- .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat/Gereja
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat/Gereja
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Konghucu
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila

- .4 Anak Nakal dan Narkoba
- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - Meliputi : Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
 - .1 Pahlawan
 - .2 Perintis Kemerdekaan
 - Meliputi : Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi, Korban Tindak Kekerasan
- 466 Sumbangan Sosial
 - Meliputi : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazaar, dsb
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Yayasan/Panti Lainnya
- 467 Bimbingan Sosial
 - Meliputi : Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman dsb
 - .1 Masyarakat Suku Terasing
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk

- .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA Dan WNI Tinggal Sementara
 - .24 Daerah Terbelakang/Tertinggal
 - .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang Asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
 - .41 Akibat Bencana Alam
 - .42 Akibat Kerusakan Sosial
 - .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
 - .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian, Dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian, Dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
 - .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak
 - .31 Pengangkatan Anak
 - .32 Pengakuan Anak
 - .33 Pengesahan Anak
 - .34 Perubahan Anak
 - .35 Pembatalan Anak
 - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan Anak
 - .41 Akibat Perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran

- .43 Non Perkawinan
- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI Ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengolahan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian vital
 - .33 Penduduk non registrasi
 - .4 Pelayanan informasi kependudukan
 - .41 Media elektronik
 - .42 Media cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Reproduksi
 - .15 Mortalitas Penduduk
 - .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak Dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi Antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
 - .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk

.41	Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
.44	Partisipasi Masyarakat
.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
.51	Pendidikan Jalur Sekolah
.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475	Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
.1	Indikator Kependudukan
.11	Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan
.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan
.2	Proyeksi Kependudukan
.21	Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan
.22	Pemanfaatan proyeksi kependudukan
.3	Analisis dampak kependudukan
.31	Penyusunan dan pengembangan
.32	Pemanfaatan analisis dampak kependudukan
.4	Penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah
.41	Lembaga internasional
.42	Lembaga masyarakat dan nirlaba
.43	Lembaga usaha swasta
.5	Penyerasian kebijakan lembaga pemerintah
.51	Lembaga pemerintah
.52	Pemerintah provinsi
.53	Pemerintah kabupaten/kota
.6	Analisis
476	Monitoring
477	Evaluasi
478	Dokumentasi
479	-
480	Media Massa
481	Penerbitan
.1	Surat Kabar
.2	Majalah
.3	Buku

.4	Penerjemahan
.5	Press
.6	Kliping koran
482	Radio
.1	RRI
.2	Non RRI
.3	Luar Negeri
.4	Swasta
.5	Komunitas
483	Televisi
.1	TVRI
.2	Televisi swasta
.3	Televisi asing
.4	Televisi lokal
484	Film
485	Pers
.1	Kewartawanan
.2	Wawancara
.3	Informasi Nasional
486	Grafika
487	Penerangan
.1	Pameran Non Komersil
488	Press/Operation Room
489	Hubungan Masyarakat
490	Pengaduan Masyarakat
491	Surat pembaca
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	

500 PEREKONOMIAN

500 PEREKONOMIAN

- .1 Dewan Stabilasi
- .2 Komisi Ekonomi

501 Pengadaan Pangan

502 Pengadaan Sandang

503 Perijinan pada umumnya, Untuk perijinan suatu bidang klasifikasikan pada masalahnya

504 Ekonomi Makro

505 Ekononomi Mikro

506 Ekonomi Kerakyatan

507 -

508 -

509 -

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan disini ; Tataniaga

- .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan produk
 - .13 Pameran non komersil
 - .14 Perlombaan (Lomba Desain, Busana, Kerajinan)
 - .15 Pasar
 - .16 Pertokoan, Kios, PKL
- .2 Pelelangan, distribusi
 - .21 Pemasaran sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
- .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
- .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanganan
 - .43 ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi

- .5 Perdagangan Antar Pulau
- .51 Kerjasama Bahan Baku
- .52 Industri Pemasaran
- .53 Kontrak
- .6 Tera
- .61 Tera Ulang Ukuran
- .62 Takaran
- .63 Timbangan
- .64 Kalibrasi
- .65 Cap Tanda Tera
- .66 Biaya Tera
- .7 Bantuan Peralatan
- .71 Proposal
- .72 Surat Perjanjian/Kontrak
- .73 Serah Terima
- .8 Perijinan/Rekomendasi tanda pabrik
- .9 Kemetrolagian
- .91 Standar Tingkat Tiga
- .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
- .93 Standar Metrologi
- .931 Peralatan
- .932 Laboratorium Metrologi
- .933 Tanki Ukuran Mobil
- .934 Meter Tanki
- .935 Kwh Meter
- .936 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan pokok, tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah minyak goreng, sabun dsb.
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .2 Ijin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .41 Kebijakan
 - .42 Pemasaran
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang

- .7 Eksportir Terdaftar
- .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Ijin Impor
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
 - .2 Standar Mutu Dagang Impor
 - .3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Impor
 - .41 Pembinaan Impor
 - .42 Pengendalian Impor
 - .43 Pemantauan Impor
 - .5 Faktor-Faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Impor
 - .7 Penyaluran Kegiatan Impor
 - .71 Bahan konsumsi
 - .72 Bahan baku
 - .73 Bahan Penolong
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Impor
- 514 Perdagangan Antar pulau
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Kerjasama bahan baku
 - .3 Industri Pemasaran
 - .4 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
(Untuk BUUD,KUD Lihat Klasf.147.231-147.232)
- 519 Metrologi

- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program

- .11 Bimas/Inmas termasuk kredit
- .12 Penyuluhan
- .2 Produksi
 - .21 Padi/Panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Ketela pohon
 - .25 Holtikulura
 - .26 Sayuran/Buah-buahan
 - .27 Tanaman hias
- .3 Sarana Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan, meliputi Traktor Dan peralatan lainnya
 - .32 Bantuan peralatan
 - .33 Pembibitan
 - .34 Pupuk
- .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit daun, batang
 - .42 Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan
 - .43 Gropyokan, sparayer, pemberantasan melalui udara
 - .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Pesawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 KTA/Lahan Kritis
- .6 Pengusaha Petani
 - .7 Bina Usaha
 - .71 Pasca Panen
 - .72 Pemasaran hasil
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusaha Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .13 Perpetaan Hutan
 - .14 Tumpang Sari
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .3 Sarana usaha kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi

- .5 Kelestarian
- .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
- .52 Berburu, meliputi : Larangan dan ijin berburu
- .53 Kebun Binatang
- .54 Konservasi Lahan
- .55 Kawasan Lindung
- .6 Penyakit/Hama
- .7 Jenis-jenis hutan
- .71 Hutan Hidup
- .72 Hutan Wisata
- .73 Hutan Produksi
- .74 Hutan Lindung
- .75 Hutan Rakyat
- 523 Perikanan dan Kelautan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pembibitan
 - .32 Daerah penangkapan
 - .33 Pertambakan meliputi : Tambak ikan, tambak udang, dll.
 - .34 Jaring terapung
 - .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
 - .7 Data Perikanan
 - .8 Nelayan
 - .81 Perkampungan Nelayan
 - .82 Pelanggaran Kapal
 - .9 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
 - .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging

- .14 Kulit
- .2 Sarana Usaha ternak
- .21 Pembibitan
- .22 Kandang ternak
- .3 Kesehatan Hewan
- .31 Penyakit Hewan
- .32 Pos Kesehatan Hewan
- .33 Tesi Pollorum
- .34 Karantina
- .35 Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya
- .4 Perunggasan
- .41 Ayam Ras
- .42 Ayam Buras
- .43 Itik
- .44 Burung
- .5 Pengembangan Ternak
- .51 Insemibasi Buatan
- .52 Pembibitan/Bibit Unggul
- .53 Penyebaran Ternak
- .6 Makanan Ternak
- .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat
 - .29 Aneka Tanaman
 - .3 Pembibitan
 - .31 Gulma
 - .4 Hama/Penyakit
 - .41 Badra
 - .5 Pengolahan Lahan
 - .51 Terasering

- 526 Ketahanan Pangan
 - .1 Program Bimbingan Masal
 - .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 kelembagaan
 - .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengolahan Hasil Pangan
 - .33 Kemitraan
 - .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem Dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana Dan Prasarana Distribusi
 - .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 Pengembangan Ketahanan Pangan
 - .1 Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
 - .2 Distribusi Harga Pangan
 - .3 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - .4 Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 528 -
- 529 -
- 530 PERINDUSTRIAN
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan dan minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
 - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara / BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/CV/PT
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD

- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN
- 541 Minyak bumi
 - .1 Pengusahaan/eksplorasi
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi/pengeboran
 - .11 Kontrak kerja
 - .2 Pengolahan, meliputi : tangki, pompa, tanker, tarakhit, tanah liat dan pasir
- 543 Aneka tambang
 - .1 Timah
 - .2 Alumunium, boxit
 - .3 Besi
 - .4 Tembaga
 - .5 Batubara
- 544 Logam Mulia : Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawas Gunung Berapi
 - .2 Sumur artetis
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Pesisir pantai/Kelautan

- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
 - .11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
 - .12 Uji kelayakan kendaraan bermotor (Kir)
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perijinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkut
 - .24 Jembatan timbang/lebih muatan
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perijinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, rambu-rambu
 - .35 Lalu lintas

.36	Alur dan Kolam pelabuhan
.37	Trayek
.38	Sarana/Kapal
.39	Kecelakaan
.4	Angkautan Danau
.41	Perijinan
.42	Terminal
.43	Pelabuhan
.44	Keselamatan, rambu-rambu
.45	Lalulintas
.46	Alur dan Kolam pelabuhan
.47	Trayek
.48	Sarana/kapal
.49	Kecelakaan
.5	Feri
.51	Perijinan
.52	Terminal
.53	Pelabuhan
.54	Sarana dan prasarana kapal
.57	Trayek
.58	Sarana/kapal
.59	Kecelakaan
.6	Perkeretaapian
.61	Sarana (Lokomotif, Gerbong, Bogie)
.62	Signal
.63	Trayek
.64	Angkutan penumpang
.65	Angkutan barang
.66	Keselamatan
.67	Kecelakaan
.68	Perawatan/perbaikan
.69	Perijinan
552	Perhubungan Laut
.1	Lalu lintas angkutan laut
.11	Keamanan lalu lintas, rambu-rambu, mercusuar
.12	Pelayaran luar negeri
.13	Pelayaran dalam negeri
.2	Perkapalan alat angkutan
.21	Kapal Penumpang
.22	Kapal Barang

- .23 Kapal Perang/Patroli/Negara
- .24 Kapal Tanker
- .25 Ponton/Tonkang
- .26 Kapal Layar
- .27 Kapal Layar Motor
- .28 Kapal Kontainer
- .3 Pelabuhan
- .31 Tanah/Lokasi
- .32 Alur Layar
- .33 Dermaga
- .34 Terminal Penumpang
- .35 Terminal Kontainer
- .36 Bangunan/Gedung/Gedung
- .37 Perlengkapan tambat labuh
- .38 Lapangan
- .39 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
- .4 Pengerukan
- .41 Alur Pelayarana
- .42 Kolam Pelabuhan
- .43 Reklamasi Pantai
- .45 Pekerjaan Bawah Air (Soluage)
- .5 Penjagaan Pantai
- .51 Patroli Bandar
- .52 Patroli Perairan
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Angkutan Udara/Keamanan lalulintas udara
 - .2 Pelabuhan udara
 - .3 Alat angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex/SSB
 - .4 Faximile
 - .5 Satelit
 - .6 Stasiun Bumi, Parabola
 - .7 Wartel
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Izin Usaha Sarana Wisata

.12	Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
.2	Wisatawan
.21	Wisatawan Mancanegara
.22	Wisatawan Nusantara
.3	Obyek Wisata dan Atraksi
.31	Obyek Wisata
Meliputi : Wisata Tirta, Situ, dan Marina Alam, Wisata Remaja dan Sosial, Wisata	
	KONvesi, Budaya dan Religius.
.32	Atraksi
.321	Hiburan Umum
.4	Promosi Kepariwisataaan
.41	Sadar Wisata
.42	Mandala Wisata
.43	Tourism Information Centre
.44	Pameran Pariwisata meliputi ; Pekan Pariwisata dan Pata
.45	Taman Mini Indonesia Indah
.46	Bimas Pariwisata
.5	Perjalanan Wisata
.51	Biro Perjalanan
.52	Angkutan Wisata
.6	Pramuwisata
	Meliputi : Pramuwisata Madya, Parmuwisata Muda, Pramuwisata Khusus
.7	Fasilitas Wisatawan
.71	Hotel/Motel
.72	Losmen/Penginapan
.73	Penginapan Remaja
.74	Pondok Wisata
.75	Perkemahan
.76	Restoran, Bar dan Diskotik
.77	Rumah Makan
557	Meteorologi
.1	Ramalan Cuaca
.11	Curah Hujan
.12	Kemarau
558	-
559	-

- 560 TENAGA KERJA
- .1 Pengangguran
 - .2 Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
 - .3 Rekrutmen Calon TKI/TKW
 - .4 Seleksi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri
 - .41 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
 - .42 Berkas Persyaratan dan Hasil Cek Kesehatan
 - .43 Perlindungan Tenaga Kerja Pelayanan
 - .44 Perlindungan TKI/TKW
 - .5 Persyaratan TKI/TKW
 - .51 Permohonan Rekomendasi Pasport
 - .52 Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu
 - .53 Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
 - .54 Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
 - .55 Pelatihan TKI/TKW
 - .56 Perjanjian Kerja TKI dengan Pengguna
 - .57 Kurikulum Pelatihan TKLN
 - .58 Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur TKLN
 - .59 Uji Kompetensi CTKI oleh LSP dan BNSP
 - .6 Pemberangkatan Tenaga Kerja
 - .61 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
 - .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri.
 - .63 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja
 - .71 Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
 - .72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
 - .73 TKI/TKW
 - .74 Pelayanan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia)
 - .75 Data dan Informasi Penempatan TKI
 - .76 Monitoring TKI
 - .77 TKI Bermasalah
 - .78 Bimbingan Pasca TKI
- 561 Upah
- .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional.
 - .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk di dalamnya upah

- lembur)
- .5 Laporan Data Remittance
- .6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
- .7 Upah Minimum Kabupaten/Kota
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
 - .1 Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja mandiri (TKMT)
 - .11 Penempatan Tenaga Kerja mandiri Profesional TKMP)
 - .12 Penempatan Tenaga Kerja Non Terdidik dan Non Profesional, Pengembangan Kesempatan berusaha /Perluasan Kerja
 - .2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - .3 Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - .31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Jasa Tenaga Kerja Lokal/Daerah antar Kerja Negara
 - .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - .33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BBK)
 - .4 Informasi Pasar Kerja
 - .41 Bursa Pasar Kerja
 - .5 Ijin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
 - .51 Antar Kerja Lokal
 - .52 Antar Kerja Antar Daerah
 - .53 Antar Kerja Antar Negara
 - .54 Tenaga Kerja Antar Kerja Khusus (Wanita, Pemuda, Lansia dan Penayandang Cacat)
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidikan Kerja
 - .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .12 Diklat di Dalam Negeri (PKL,Prakerim,OJT)
 - .13 Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .2 Instruktur/Pelatih
 - .23 Modul /Silabus dan Bahan Praktek
 - .24 Kurikulum
 - .25 Sertifikat

- .3 Kerjasama Pelatihan Kerja
- .4 Produktivitas Tenaga Kerja
- .5 Pemagangan Tenaga Kerja
- .51 Diklat Pemagangan
- .6 Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi
- 564 Tenaga kerja Sukarela
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Kerja
- 565 Perselisihan Perburuhan
 - .1 Perselisihan dan Perkara Hukum Tenaga Kerja
 - .11 Pengaduan Perkara Perburuhan
 - .12 Pemeriksaan Perkara
 - .13 Penyelidikan
 - .14 Sidang Perkara Perselisihan Buruh
 - .15 Hasil Putusan Sidang Perkara perselisihan Buruh
 - .16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K
 - .17 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Putusan KP2K
 - .18 Daftar Usulan, Susulan dan penetapan Anggota KP2K
 - .2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - .3 Keterangan Kelayakan Atau Pelindung Diri (APD) dalam Kerja
 - .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - .5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
 - .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha (Misal : suara bising, Limbah dll)
 - .8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - .81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat/Angkut)
 - .82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Katel Uap)
 - .83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
 - .84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki tak Bertekanan

- .85 Pemasangan dan Pemakaian alat Pemadam Kebakaran
- .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita masuk malam Hari (Sift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - .1 Pengaduan PHK Sepihak
 - .2 PHK Masal
 - .3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK
 - .4 Ijin Melakukan PHK
 - .5 Perhitungan masa Kerja Bagi Pekerja yang Di PHK
 - .6 Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang Di PHK
 - .7 Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja/Buruh
 - .1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi Tenaga Kerja
 - .11 Pemilihan Pekerja Teladan
 - .2 Perumahan Pekerja
 - .3 Keikutseraan Pekerja Dalam Program Jamsostek
 - .4 Koperasi Pekerja
 - .5 Perpustakaan Pekerja
 - .7 Tempat Ibadah Pekerja
 - .8 Rekreasi dan Olahraga Pekerja
 - .9 Lembaga Kerjasama Bipartit
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja (IKTA)
 - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - .4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
 - .5 Data Tenaga Kerja Asing
 - .6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan dan Pengaduan tenaga Kerja Asing.
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
 - .1 Kerja sama Penanaman Modal Antar Provinsi
 - .2 Kerja sama Penanaman Modal Antar Kabupaten/Kota

573	Modal Patungan (Joint venture)/Penyertaan modal
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Belanja Modal
577	Modal Daerah
578	Bursa Efek
579	Obligasi
580	PERBANKAN/MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan ; Pembukaan, penutupan rekening, deposito
.1	Deposito
.2	Tabanas
.3	Rekening
.4	hadiah Tabungan
584	Bank Pembangunan Daerah/Lembaga Perbankan
.1	Bank Pemerintah
.2	Lembaga perbankan daerah
.21	Lembaga Keuangan Kecamatan
.22	BPR
.3	Bank Swasta
.4	Bank Syariah
585	Asuransi dana kecelakaan dan lalulintas
.1	Polis
.2	Premi
.3	Tertanggung/Pemegang Polis
.4	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran, cek, giro, wesel, transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tataguna Tanah
.1	Pemetaan Dan Pengukuran
.2	Perpetaan
.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
.4	Fatwa Tataguna Tanah
.5	Tanah kritis

- 592 Landeform
- .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian.
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .211 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan Dana Lanreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak-hak Tanah
- .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchrus.
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung-Gedung Negeri
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar

.42	Perkebunan Rakyat
.43	Peternakan
.44	Perikanan
.45	Kehutanan
.5	Hak Guna Bangunan
.51	Perorangan
.52	Badan Hukum
.6	Hak Pengelolaan
.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate)
.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
.7	Sengketa
.71	Peradilan Perkara Tanah (Lihat Juga 183)
.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
.81	Pencabutan Hak
.82	Pembebasan Tanah
.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
.1	Pengukuran/Pemetaan
.11	Fotogrametri
.12	Teristris
.13	Triangulasi
.14	Peralatan
.2	Dana Pengukuran
.3	Sertifikat
.4	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
595	Tanah Untuk Transmigrasi
.1	Tata Guna Tanah
.2	Landerform
.3	Pengurusan hak-hak Tanah
.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-

600

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 601 Tata Bangunan, Konstruksi, Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Penunjukan
 - .3 Prakuualifikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu
 - .32 Tanda Daftar Rekanan
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah dan Batu (seperti : Batu Belah, Steen Slag, Solit, Pasir, Koral, lempung, Kapur, Marmer).
 - .2 Aspal
 - .3 Besi dan Logam Lainnya
 - .31 Besi Beton
 - .32 Besi Profil (Konstruksi)
 - .33 Baja
 - .34 Paku
 - .35 Aluminium Profil
 - .4 Bahan-bahan Pelindung dan Pengawet (Cat, Pengawet Kayu)
 - .5 Semen
 - .6 Kayu
 - Seperti : Balok, Papan, Dolken, Plywood, Gabus dsb)
 - .7 Bahan Penutup Atap
 - (Genteng, Asbes Gelombang, Seng, dsb)
 - .8 Alat-Alat Penggantung dan Pengunci
 - .9 Bahan-bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik
 - .3 Instalasi Air/Sanitasi
 - .4 Instalasi Pengatur Udara
 - .5 Instalasi Akustik
 - .6 Instalasi Cahaya/Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
 - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
 - .2 Terhadap Gempa

.3	Terhadap Angin/Udara/Panas
.4	Terhadap Kegaduhan
.5	Terhadap Gas/Eksplosive
.6	Terhadap Serangga
.7	Terhadap Radiasi Atom
607	-
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
.1	Bangunan Waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan Banjir
.14	Menara Pengambilan
.2	Bangunan Pengambilan
.21	Bendungan
.22	Bendungan Dengan Pintu Bilas
.23	Bendungan Dengan Pompa
.24	Pengambilan Bebas
.25	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
.26	Sumur Dengan Pompa
.27	Kantung Lumpur
.28	Slit Ekstraktor
.29	Escape Chanel
.3	Bangunan Pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran Induk
.312	Saluran Sekunder
.313	Susplesi
.314	Tersier
.315	Saluran Kwarter
.316	Saluran Pasangan
.317	Saluran Tertutup/Terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan Bagi
.322	Bangunan Bagi dan Sadap
.323	Bangunan Sadap
.324	Bangunan Check

.325	Bangunan Terjun
.33	Box Tersier
.34	Got Miring
.35	Talang
.36	Syphon
.37	Gorong-Goron
.38	Pelimpahan Samping
.4	Bangunan Pembuang
.41	Saluran
.411	Saluran Pembuang Induk
.412	Saluran Pembuang Sekunder
.413	Saluran Pembuang Tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan Out Let
.422	Bangunan Terjun
.423	Bangunan Penahan Banjir
.43	Gorong-Gorong Pembuang
.44	Talang Pembuang
.45	Syphon Pembuang
.5	Bangunan Lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan Inspeksi
.512	Jalan Logistik
.52	Jembatan
.521	Jembatan Inspeksi
.522	Jembatan Hewan
.53	Tangga Cuci
.54	Kubangan Kerbau
.55	Waduk Lapangan
.56	Bangunan Penunjang
.57	Jaringan Telepon
.58	Stasiun Agro
612	Folder
.1	Tanggul Keliling
.11	Tanggul
.12	Bangunan Penutup Sungai
.13	Jembatan
.2	Bangunan Pembawa
.21	Saluran

- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Induk
- .213 Saluran Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
- .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuangan
- .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuangan Induk
 - .322 Saluran Pembuangan Sekunder
- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .35 Syphon Pembuangan
- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpan Air
 - .115 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuangan Induk
 - .212 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air/ Penyimpan Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Lainnya/Pasang

- .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan

- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengamanan
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 Chek Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Courpore
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning Sistem
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Hujan
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .4 Bangunan Lainnya

617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
.1	Daerah Penguasa
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilitas
.4	Perkerasan (Pavemen)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong-Gorong
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median/Medium
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping

.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-patok KM
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan (Pavement)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.53	Sub Drainage
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan

.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
623	Pengaspalan
624	Pembetonan
625	Hotmix
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada Jalan Kota
.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah

.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengamanan
.71	Turap/ Penahan
.72	Brojong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Corpore
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit (Oprit)
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median

632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Pengusaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan Atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/ Penahan
.72	Brojong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Courpore
.76	Krib (Kriup)

.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.84	Patokan Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit/Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Bahu
.95	Median
633	-
634	-
635	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung Pengadilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPRD
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
.7	Gedung Lainnya
642	Bangunan Pendidikan
.1	Taman Kanak-kanak
.2	SD dan Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
.1	Bangunan Olah Raga
.2	Gedung Kesenian
.3	Gedung pemancar
.4	Gedung Lainnya

- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Perkantoran dll
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
 - .9 Bangunan Lainnya
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
 - .5 Rumah Lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Di Atas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .31 Atap Genting
 - .32 Atap Asbes

- .33 Atap Seng
- .4 Lantai/Langit-langit
- .41 Suspended
- .42 Solit
- .5 Pintu/Jendela
- .51 Pintu Harmonik
- .52 Pintu Biasa
- .53 Pintu Sorok (Sorong)
- .54 Jendela Kayu
- .55 Jendela Sorok (Sorong)
- .56 Jendela Vertikal

- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Pebelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (Site dan Service)
 - .1 Kepadatan Rendah (Low Density)
 - .2 Kepadatan Tinggi (High Density)
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Taman Kota (PublicGarden)
 - .2 Sport and Playing Fields
 - .3 Open Space
- 656 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Saluran Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaring
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/sampah
 - .213 Bangunan Pengendapan

.214	Bangunan Pengering Lumpur
.22	Unit Desinfektan
.23	Unit Pemompaan
658	Kesehatan Lingkungan
.1	Persampahan
.11	Bangunan Pengumpul
.12	Bangunan Pemusnahan]
.2	Pengotoran Udara
.3	Pengotoran Air
.31	Air Buangan Industri/Limbah
.4	Kegaduhan
.5	Kebersihan Kota
659	-
660	TATA LINGKUNGAN
.1	Lingkungan Hidup
.2	Kebersihan Lingkungan
.3	Pencemaran
.31	Pencemaran Air
.32	Pencemaran Udara
.33	Pencemaran Limbah B3
661	Daerah Hutan
662	Daerah Pertanian/perkebunan
663	Daerah Pemukiman
664	Pusat Pertumbuhan
665	Transportasi
.1	Jaringan Jalan
.2	Jaringan Kereta Api
.3	Jaringan Sungai
666	-
667	-
668	-
669	-
670	KETENAGAAN
671	Listrik
.1	Kelistrikan
.11	Kelistrikan PLN
.12	Kelistrikan Non PLN
.2	Pembangkit Tenaga Listrik

.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
.28	Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya
.3	Transmisi Tenaga Listrik
.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
.33	Kabel Bawah Tanah
.34	Kabel Bawah Laut/Air
.4	Distribusi Tenaga Listrik
.41	Gardu Distribusi
.42	Tegangan Rendah
.43	Tegangan Menengah
.44	Tegangan Tinggi
.45	Jaringan Bawah Tanah
.5	Penguasaan Listrik
.51	Sambungan Listrik
.52	Penjualan Tenaga Listrik
.53	Tarif Listrik
.54	Instalatur Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	Peralatan Berat
682	Peralatan Ringan
683	-
684	-

685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intake
.1	Broncaptering
.2	Sumur
.21	Sumur Pompa
.22	Sumur Artesis
.3	Bendungan
.4	Saringan (Screen)
.5	Pintu Air
.6	Saluran Pembawa
.7	Alat Ukur
.8	Perpompaan
692	Tranmisi Air Beku
.1	Perpipaan
.2	Katup Udara (Air Relief)
.3	Katup Penguras (Blow Off)
.4	Bak Pelepas Tekanan
.5	Jembatan Pipa
.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
.1	Bangunan Ukur
.2	Bangunan Areasi
.3	Bangunan Pengendapan
.4	Bangunan Penyuluh Bahan Kimia
.5	Bangunan Pengaduk
.6	Bangunan Saringan
.7	Perpompaan
.8	Cear Hell
694	Distribusi
.1	Reservoir Menara Bawah Tanah
.11	Menara
.12	Reservoir Di Bawah Tanah
.2	Perpipaan
.3	Perpompaan

.4	Jembatan Pipa
.5	Syphon
.6	Hydran
.61	Hydran Umum
.62	Hydran Kebakaran
.7	Katup
.71	Katup Udara (Air Relief)
.72	Katup Pelepas (Blow Off)
.8	Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)
695	Perusahaan Daerah Air Minum
696	-
697	-
698	-
699	-

700
PENGAWASAN

700	PENGAWASAN
701	Bidang Urusan Dalam
702	Bidang Peralatan
703	Bidang Kekayaan Daerah
704	Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
705	Bidang Perencanaan
706	Bidang Organisasi/ketatalaksanaan
707	Bidang penelitian
708	Bidang konferensi
709	Bidang perjalanan dinas
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Bidang Pemerintahan Pusat
712	Bidang Pemerintahan Provinsi
713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
714	Bidang Pemerintahan Desa
715	Bidang MPR/DPR
716	Bidang DPR Provinsi
717	Bidang DPR Kabupaten/Kota
718	Bidang Hukum
719	Bidang Hubungan Luar Negeri
720	BIDANG POLITIK
721	Bidang Kepartaian
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh, Tani Dan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Keamanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana

737	Bidang Kecelakaan
738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	-
771	-
772	-
773	-
774	-

775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
788	Bidang Pemberhentian Pegawai
789	Bidang Pendidikan Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Vertifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan
796	Bidang Pembina Kebendaharaan
797	Bidang Pendapatan
798	-
799	Bidang Bendaharaan

800
KEPEGAWAIAN

800	KEPEGAWAIAN Klasifikasi Disini : Kebijakanasanaan Pegawai
.1	Perencanaan
.2	Penelitian
.043	Pengaduan
.05	Tim
.07	Statistik
.08	Peraturan Perundang-Undangan
801	-
802	-
803	-
804	-
805	-
806	-
807	-
808	-
809	-
810	PENGADAAN Meliputi : Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
811	Lamaran
.1	Testing
.2	Screening
.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres/Guru Bantu
814	Pengangkatan Lepas
.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
.2	Pengangkatan Tenaga Harian
.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan

- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -
- 820 MUTASI
Meliputi : Pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, datasering, tugas belajar, wajib militer, dsb
- 821 Pengangkatan
- .1 Pengangkat menjadi Pegawai tetap
- .11 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
- .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
- .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
- .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di
- .15 Luar Tanggungan Negara
Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan,
- .2 Berita Acara Serah Terima Jabatan
- .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala
- .22 Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda Kepala
Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala
- .23 Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian Kepala
Seksi/Kepala
- .24 Bidang/Pemeriksa
- .25 Residen/Pembantu Gubernur
- .26 Wedana/Pembantu Bupati
- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan I
- .2 Pegawai Golongan II
- .3 Pegawai Golongan III
- .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan I
- .2 Pegawai Golongan II
- .3 Pegawai Golongan III

- .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - .5 Lolos Butuh
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Belajar
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN
Meliputi : Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji,
Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijazah/Penyediaan
- 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -
- 838 -
- 839 -
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 - .1 Meliputi : Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi,
Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan
Dispenasasi
- 841 Tunjangan

- .1 Jabatan
- .2 Kehormatan
- .3 Kematian/Uang Duka
- .4 Tunjangan Hari Raya
- .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
- .6 Keluarga
- .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapetarum)
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan Dokter
 - .3 Obat-Obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -
- CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti
- 850 Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
- 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting

- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN
Meliputi : Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
- 861 Penghargaan
- .1 Bintang/Satyalencana
- .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- .3 Kenaikan Gaji Istimewa
- .4 Hadiah Berupa Uang
- .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
- .1 Teguran Peringatan
- .2 Penundaan Kenaikan Gaji
- .3 Penurunan Pangkat
- .4 Pemindahan
- Catatan : Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan Pemberitahuan Tidak Dengan Hormat Lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
- .1 Tingkat I
- .2 Tingkat II
- .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi : petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat, Hak Penggajian, Sumpah/Janji dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting
- 873 Registrasi

- .1 NIP
- .2 KARPEG
- .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu

- 874 Daftar Riwayat Hidup / Pekerjaan/
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin Kepartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -

- 880 **PEMBERHENTIAN**
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Golongan 1
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai golongan I
 - .2 Golongan 2
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan II
 - .3 Golongan 3
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III
 - .4 Golongan 4
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
 - .8 Pensiun Dini
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon

- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 998 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
- .1 Program
- .2 Kurikulum dan Silabi
- .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan _Eguler/Kader
- .1 IPDN/STPDN
- .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan Dan Pelatihan/Non Reguler
- .1 LEMHANAS
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN
- .2 SPAMA , ADUMLA, ADUM
- .3 Kursus-Kursus/Penataran
- .4 Diklat teknik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
- .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
- .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
- .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
- .1 Kuliah
- .2 Ceramah, Simposium
- .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
- .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
- .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
- .7 Penugasan
- .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
- .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
- .1 Tahun Pelajaran
- .2 Persyaratan, meliputi Pendaftaran, Testing, Ujian

- .3 STTP
- .4 Penilaian Angka Kredit
- .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900
KEUANGAN

900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi (Perlimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Rutin / BTL
912	Pembangunan / BL
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP) / DPA
.1	Daftar Usulan Proyek (DUP) / RKA
.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
919	-
920	OTORISASI/SKO
921	Rutin / BTL
922	Pembangunan / BL
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (Daftar P8)

932	SPM Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6.P7)
934	SPJ Rutin / BTL
935	SPJ Pembangunan / BL
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagih Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	-
958	-
959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
966	-
967	-
968	-
969	-

970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/PNBP
978	Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya
979	Pendapatan lainnya
.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
.12	Penjualan Rumah Jabatan, Rumah Dinas
.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
.16	Penjualan Drum Bekas
.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
.2	Penerimaan Jasa Giro
.21	Jasa Giro Kas Daerah
.22	Jasa Giro Pemegang Kas
.23	Jasa Giro Khusus
.3	Penerimaan Bunga Bank
.31	Bunga Deposito
.32	Bunga Tabungan
.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TPTGR)
.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
.42	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
.43	Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
.5	Penerimaan Lain-lain
.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
.52	Ternak Tidak Layak Bibit
.53	Sewa Internet
.54	Penerimaan dan Dana Bergulir
.55	Kerjasama Dengan Bumida
.56	Penerimaan DUKS
.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
.58	Setoran TP/TGR
.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas

980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990 BENDAHARAWAN
991 SKPP/SPP
992 Teguran SPJ
993 -
994 -
995 -

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN